Jurnal Dedikasi untuk Negeri
Volume 5 Nomor 1, Juli 2026
Universitas Muhammadiyah Lampung
E-ISSN. 2962-9608
http://journal.uml.ac.id/JDN

PENGUATAN PEMAHAMAN OTONOMI DAERAH MELALUI SOSIALISASI PARTISIPATIF BAGI MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Putri Rahmaini[1], Goestyari Kurnia Amantha[2], Tia Marlinda Sari[3], Suprihatin[4]

[1 3 4] Universitas Muhammadiyah Lampung
[2] Universitas Lampung
**Penulis korespondensi: rahmaini34@gmail.com*

Abstrak

Otonomi daerah menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun, rendahnya pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan bentuk partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang otonomi daerah serta mendorong keterlibatan aktif dalam pembangunan desa. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah dengan melibatkan 50 peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa. Metode yang digunakan meliputi observasi awal, penyuluhan, *Focus Group Discussion* (FGD), simulasi partisipasi pembangunan, serta evaluasi melalui *pre-test dan post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep otonomi daerah dari 52% menjadi 89%. Pemahaman terhadap mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) meningkat dari 47% menjadi 86%, sedangkan kesadaran untuk terlibat dalam pengawasan pembangunan meningkat dari 55% menjadi 91%. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong keterlibatan mereka dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan peran masyarakat sebagai mitra pembangunan.

Kata Kunci: Otonomi Daerah; Partisipasi Masyarakat; Pemerintahan Daerah

Abstract

Regional autonomy positions communities as key actors in governance and development processes. However, limited public understanding of their rights, obligations, and forms of participation remains a challenge to achieving participatory development. This community service program aimed to enhance public understanding of regional autonomy and encourage active involvement in village development. The program was conducted in Central Lampung Regency and involved 50 participants, including community leaders, youth representatives, and village officials. The methods employed included preliminary observation, educational outreach, Focus Group Discussions (FGDs), development participation simulations, and evaluation through pre-tests and post-tests. The results indicated a significant improvement in participants' understanding of the concept of regional autonomy, increasing from 52% to 89%. Understanding of the Development Planning Deliberation mechanism (Musrenbang) improved from 47% to 86%, while awareness of the importance of participating in development oversight increased from 55% to 91%. These findings demonstrate that a participatory socialization approach is effective in strengthening community capacity and promoting greater involvement in local development processes. This program contributes to

strengthening participatory, transparent, and accountable governance by enhancing the role of communities as development partners.

Keywords: *Regional Autonomy; Community Participation; Village Development*

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam paradigma otonomi daerah, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat bergantung pada tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip tersebut juga tercermin dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021–2026 yang menyebutkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan partisipatif tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa yang tersebar pada 28 kecamatan dan ratusan kampung/desa. Besarnya jumlah penduduk tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Tingginya jumlah penduduk membutuhkan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu memahami mekanisme pemerintahan daerah dan berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan.

Dari sisi pembangunan manusia, data BPS menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek pendidikan, kesejahteraan, dan kualitas sumber daya manusia. RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021–2026 juga menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk pemahaman mengenai otonomi daerah, menjadi kebutuhan yang mendesak.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Inovasi Daerah, dan berbagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah terus mendorong penguatan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk mekanisme partisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pengawasan pembangunan, serta pengambilan keputusan publik.

RPJMD Kabupaten Lampung Tengah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala di tingkat desa. Sebagian masyarakat masih memandang pembangunan sebagai tanggung jawab pemerintah semata sehingga partisipasi yang muncul sering kali bersifat pasif dan terbatas pada kehadiran dalam kegiatan formal tanpa keterlibatan substantif dalam proses pengambilan keputusan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara semangat otonomi daerah yang menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pemerintahan daerah. Di satu sisi, regulasi dan dokumen perencanaan daerah telah memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat, tetapi di sisi lain kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan ruang partisipasi tersebut masih terbatas.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat partisipasi dalam pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Wahyudi (2018) menemukan bahwa tingkat literasi pemerintahan dan pembangunan berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Penelitian Fitriani dkk. (2020) juga menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi publik mampu meningkatkan partisipasi warga dalam Musrenbang dan pengawasan pembangunan desa.

Penelitian lainnya oleh Suryono (2019) mengungkapkan bahwa rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah umumnya disebabkan oleh minimnya akses informasi dan kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pemerintahan daerah. Sementara itu, hasil penelitian Putra dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui diskusi kelompok dan simulasi perencanaan pembangunan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dibandingkan metode ceramah konvensional.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek perencanaan pembangunan desa atau evaluasi Musrenbang. Masih terbatas kajian maupun kegiatan pengabdian yang secara khusus menekankan penguatan pemahaman masyarakat mengenai konsep otonomi daerah sebagai fondasi utama partisipasi publik, khususnya pada masyarakat desa di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya upaya peningkatan literasi masyarakat tentang otonomi daerah yang dikaitkan secara langsung dengan

peningkatan partisipasi pembangunan di tingkat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan pada penguatan pemahaman otonomi daerah melalui pendekatan sosialisasi partisipatif. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan ruang partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021–2026.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah dengan sasaran masyarakat desa yang terdiri atas tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai otonomi daerah serta mendorong keterlibatan aktif dalam pembangunan desa. Tahapan kegiatan disusun secara sistematis mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi hasil kegiatan.

Alur pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut: Observasi Awal, Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Masyarakat, Penyusunan Materi Sosialisasi, Pelaksanaan Sosialisasi Otonomi Daerah, *Focus Group Discussion* (FGD), Evaluasi (*Pre-test dan Post-test*).

Pada tahap observasi awal, tim melakukan pengumpulan informasi melalui wawancara dan diskusi dengan perangkat desa serta perwakilan masyarakat untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat terkait otonomi daerah dan partisipasi pembangunan. Hasil observasi digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi sosialisasi yang mencakup konsep otonomi daerah, hak dan kewajiban masyarakat, mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah.

Instrumen evaluasi yang digunakan berupa kuesioner pre-test dan post-test yang terdiri atas 20 butir pertanyaan menggunakan skala Guttman (jawaban benar = 1 dan salah = 0). Instrumen disusun berdasarkan empat indikator utama, yaitu: (1) pemahaman konsep otonomi daerah (5 item), (2) pemahaman hak dan kewajiban masyarakat dalam pembangunan (5 item), (3) pemahaman mekanisme Musrenbang (5 item), dan (4) pemahaman peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan (5 item). Selain itu, data kualitatif diperoleh melalui hasil diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) dan observasi selama kegiatan berlangsung.

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test dan post-test* peserta. Tingkat peningkatan pemahaman dihitung menggunakan persentase peningkatan skor rata-rata dengan rumus:

$$\text{Peningkatan (\%)} = \frac{\text{Skor Post Test} - \text{Skor Pre Test}}{\text{Skor Pre Test}} \times 100\%$$

Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif melalui perhitungan rata-rata skor dan persentase peningkatan hasil *pre-test dan post-test*.

Sementara itu, data hasil FGD dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman, persepsi, dan komitmen masyarakat terhadap partisipasi pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan, seluruh peserta diberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat program serta mengikuti kegiatan secara sukarela. Kerahasiaan identitas peserta dijaga dan seluruh informasi yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema *Penguatan Pemahaman Otonomi Daerah melalui Sosialisasi Partisipatif bagi Masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Tengah* dilaksanakan selama empat minggu dengan melibatkan 50 peserta yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan diawali dengan observasi awal dan *pre-test* untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat terkait konsep otonomi daerah, hak dan kewajiban masyarakat, serta mekanisme partisipasi dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), simulasi partisipasi pembangunan, dan evaluasi melalui *post-test*.

Berdasarkan hasil observasi awal dan *pre-test*, diperoleh gambaran bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai otonomi daerah masih relatif rendah, yaitu sebesar 52%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami secara optimal peran dan fungsi pemerintah daerah serta posisi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Rendahnya pemahaman tersebut berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan yang menjadi salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan metode partisipatif yang menekankan interaksi dua arah antara narasumber dan peserta. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar otonomi daerah, hak dan kewajiban masyarakat dalam pembangunan, mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pentingnya pengawasan pelayanan publik. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi yang ditunjukkan melalui banyaknya pertanyaan dan diskusi terkait permasalahan pembangunan yang dihadapi di tingkat desa.

Selanjutnya, kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) menjadi sarana bagi peserta untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan yang terjadi di lingkungan masing-masing. Hasil diskusi menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan akses informasi mengenai program pembangunan, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan, serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah. Selain mengidentifikasi permasalahan, FGD juga menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain peningkatan frekuensi sosialisasi kebijakan daerah, optimalisasi peran pemerintah desa dalam penyebaran informasi pembangunan, serta penguatan forum partisipasi masyarakat di desa.

Jurnal Dedikasi untuk Negeri
Volume 5 Nomor 1, Juli 2026
Universitas Muhammadiyah Lampung
E-ISSN. 2962-9608
http://journal.uml.ac.id/JDN

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai otonomi daerah meningkat dari 52% sebelum kegiatan menjadi 89% setelah kegiatan dilaksanakan. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 37 poin persentase. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi partisipatif yang dipadukan dengan diskusi kelompok mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami substansi otonomi daerah dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 1. *Hasil Pelaksanaan Kegiatan*

No	Kegiatan	Waktu	Hasil
1	Observasi Awal dan *Pretest*	Minggu I	Diperoleh data awal tingkat pemahaman masyarakat sebesar 52%
2	Sosialisasi Otonomi Daerah	Minggu II	Peserta memahami konsep, tujuan, dan manfaat otonomi daerah
3	*Focus Group Discussion* (FGD)	Minggu III	Teridentifikasi berbagai permasalahan dan solusi pembangunan daerah
4	Evaluasi dan *Post-test*	Minggu IV	Tingkat pemahaman masyarakat meningkat menjadi 89%

Analisis yang lebih rinci menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terjadi pada seluruh indikator yang diukur. Pemahaman mengenai konsep otonomi daerah meningkat dari 52% menjadi 89%, pemahaman hak dan kewajiban masyarakat meningkat dari 48% menjadi 87%, pemahaman mekanisme Musrenbang meningkat dari 47% menjadi 86%, sedangkan pemahaman mengenai pengawasan pelayanan publik meningkat dari 55% menjadi 91%.

Tabel 2. *Tingkat Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan*

Indikator	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman Otonomi Daerah	52	89	37
Hak dan Kewajiban Masyarakat	48	87	39
Mekanisme Musrenbang	47	86	39
Pengawasan Pelayanan Publik	55	91	36

Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman hak dan kewajiban masyarakat serta mekanisme Musrenbang yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 39%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum memahami secara memadai bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan dalam pembangunan daerah. Setelah memperoleh materi dan mengikuti diskusi, peserta menjadi lebih memahami prosedur penyampaian aspirasi serta pentingnya keterlibatan dalam forum perencanaan pembangunan. Sementara itu, peningkatan pada indikator pengawasan pelayanan publik menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi kontrol sosial dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

https://doi.org/10.36269/jdn.v5i1.5495

Hasil kegiatan ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat yang menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan dan akses informasi merupakan faktor penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian Fitriani dkk. (2020) dan Putra & Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dengan demikian, peningkatan pemahaman yang diperoleh peserta berpotensi meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam berbagai forum pembangunan di tingkat desa maupun daerah.

Kebaruan (*novelty*) kegiatan ini terletak pada penerapan model sosialisasi partisipatif yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga mengintegrasikan *Focus Group Discussion* sebagai media identifikasi masalah dan perumusan solusi pembangunan secara langsung oleh masyarakat. Pendekatan ini menghasilkan dua luaran sekaligus, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat dan tersusunnya rekomendasi pembangunan berbasis kebutuhan lokal yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Implikasi kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan pemahaman otonomi daerah dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam Musrenbang, pengawasan pelayanan publik, serta berbagai kegiatan pembangunan diharapkan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kapasitas masyarakat dalam mendukung implementasi otonomi daerah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berhasil mencapai tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa di Kabupaten Lampung Tengah mengenai otonomi daerah dan mendorong keterlibatan mereka dalam pembangunan daerah. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan tingkat pemahaman masyarakat dari 52% sebelum kegiatan menjadi 89% setelah kegiatan dilaksanakan. Peningkatan juga terjadi pada seluruh indikator yang diukur, yaitu pemahaman hak dan kewajiban masyarakat dari 48% menjadi 87%, pemahaman mekanisme Musrenbang dari 47% menjadi 86%, serta pemahaman mengenai pengawasan pelayanan publik dari 55% menjadi 91%.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi partisipatif yang dipadukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Selain meningkatkan pengetahuan peserta, kegiatan ini juga menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi pembangunan yang bersumber langsung dari masyarakat sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Perlu dilakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada masyarakat desa untuk memastikan pemahaman yang telah diperoleh dapat diimplementasikan dalam

berbagai forum partisipasi pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai kebijakan daerah, mekanisme Musrenbang, serta pengawasan pelayanan publik agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim peneliti, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan seluruh peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan laporan pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.

Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kurniawan, D., & Haryanto, J. T. (2022). Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah pada era otonomi daerah. Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 145–158.

Mardiasmo. (2021). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, L. J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2020). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pratama, Y., & Lestari, S. (2023). Penguatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi kebijakan publik dalam meningkatkan partisipasi pembangunan desa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 55–64.

Putra, A. D., & Suryani, N. (2022). Implementasi otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(1), 23–35.

Suharto, E. (2021). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wasistiono, S., & Wiyoso, Y. (2020). Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokusmedia.

Widjaja, H. A. W. (2020). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yulianto, A., & Rahmawati, I. (2023). Edukasi masyarakat tentang tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif. Jurnal Dedikasi Masyarakat, 5(2), 88–99.

Zubaedi. (2020). Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Jakarta: Kencana**.**